

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam guna menghasilkan sumber daya buatan manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, semua bangsa berusaha meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya secara berkelanjutan agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya.

Pendidikan yang berkualitas memiliki peran strategis dalam menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Sependapat dengan (Suryadi, 2005:189) mengemukakan bahwa “pemerintah berupaya meningkatkan mutu di bidang pendidikan agar di kemudian hari akan diperoleh sumber daya manusia yang menguasai keahlian dan keterampilan, sehingga dapat bekerja secara profesional, serta dapat menghasilkan karya-karya yang bermutu dan memberikan peranan serta sumbangsih dalam pembangunan bangsa dan negara”.

Menurut peringkat *Global Talent Competitiveness Index* (GTCI) 2020 menempatkan Indonesia di urutan 65 dari 132 negara di dunia. Survei yang dirilis pada Desember 2019 oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) terkait kinerja belajar siswa, Indonesia disebut menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Data diatas memperlihatkan kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Selain itu, kualitas sumber daya

manusia juga dapat diamati dari kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan setiap sekolah.

Sekolah berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki masing-masing peserta didik secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Setiap peserta didik memiliki potensinya masing-masing dan sekolah harus mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik agar perkembangan potensinya sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal melalui proses pembelajaran yang sistematis, terencana dan berkesinambungan.

Mutu merupakan sebuah keharusan dan konsep yang paling sesuai dalam menjawab berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh setiap organisasi tidak terkecuali sekolah. Mutu sekolah merupakan ukuran yang dicapai oleh sekolah dalam memenuhi harapan konsumen. Peningkatan kualitas mutu sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan manajemen mutu yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan praktik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur pendidikan. Oleh karena itu praktik peningkatan mutu sekolah tidak terlepas dari nilai-nilai ideologi yang melandasi praktik pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018, yakni : “(1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pendidikan, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, dan

(8) standar biaya operasi”. Standar Nasional Pendidikan hakikatnya sebagai indikator dan acuan dalam menentukan keberhasilan pendidikan.

Nyatanya, indikator diatas belum cukup mampu mengatasi permasalahan mutu pendidikan yang ada. Rendahnya mutu pendidikan khususnya di sekolah menengah kejuruan ditandai dengan rendahnya tingkat mutu kompetensi lulusan sekolah. Kompetensi lulusan sekolah yang rendah di SMK dapat dilihat dari keterserapan lulusan yang belum optimal. Pada Tabel 1.1 menggambarkan pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

**Tabel 1.1**  
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan  
2017-2018 (persen)

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2017		2018	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Tidak/belum pernah sekolah	1.32	0.90	0.61	0.45
2	Tidak/belum tamat SD	7.81	5.77	6.50	4.67
3	SD	18.45	12.91	14.08	12.83
4	SLTP	18.29	18.19	18.19	16.16
5	SLTA Umum/SMU	22.17	27.28	24.02	27.57
6	SLTA Kejuruan/SMK	19.74	23.15	20.73	24.74
7	Akademi/Diploma	3.56	3.47	4.38	3.16
8	Universitas	8.66	8.83	11.48	10.42

Sumber : Dokumen Badan Pusat Statistik Nasional, diakses 06/09/2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa angka pengangguran terbuka dari jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tahun 2017 bulan Februari sebanyak 19,74% dan pada bulan Agustus tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 3,41% menjadi 23,15%, dan pada tahun 2018 bulan Februari terjadi penurunan sebanyak 2,42% menjadi 20,73%, namun pada bulan Agustus tahun

2018 terjadi peningkatan sebanyak 4,01% menjadi 24,74%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, jumlah pengangguran ini cukup tinggi untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK).

Jumlah tingkat pengangguran terbuka di provinsi Banten sempat menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia sebesar 8,52% pada Agustus 2018. Angka ini bahkan lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34% dan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat sebesar 8,17% serta DKI Jakarta 6,24%. Dari segi pendidikan, TPT disumbang oleh mereka yang lulusan SD 4,91%, SMP 9,87%, SMK 14,23%, SMA 12,49%, Diploma 3,76% dan lulusan Universitas sebanyak 4,58%. (<https://news.detik.com/banten-duduk-peringkat-teratas-angka-pengangguran-di-indonesia>. diakses 16 September 2019). Lebih lanjut pada Februari 2019, TPT untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65% dapat dilihat dari data yang disajikan berikut:



Sumber : Dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, diakses 08/09/2019

### Gambar 1.1

Histogram Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2017-Februari 2019

Berdasarkan data di atas sangat memprihatinkan mengingat keterserapan lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) oleh dunia industri sangat rendah. Gejala ini tentu perlu segera diperbaiki agar tidak semakin meruncing dan berdampak lebih parah pada pengangguran yang akan semakin meningkat dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *miss match* antara apa yang dipelajari siswa di sekolah dengan kebutuhan industri.

Hal ini terlihat kontras ketika terdapat data yang menyajikan bahwa lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Berkaitan dengan hal itu, Presiden Jokowi menginstruksikan adanya perombakan pada pendidikan kejuruan dengan membuat Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang berfokus pada empat hal yaitu: (1) kurikulum fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*), (2) ketersediaan dan perbaikan kompetensi tenaga pendidik, (3) kerja sama SMK dengan dunia kerja, (4) SMK terakreditasi, lulusan tersertifikasi. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tenaga kerja tingkat menengah Indonesia baik segi jumlah maupun kualitasnya dalam rangka menghadapi diberlakukannya perdagangan bebas. Di samping itu, dengan banyaknya jumlah SMK diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah serta memperkuat kualitas kehidupan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang.

Niat baik pemerintah ini, bukanlah tanpa kendala mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, relasi dengan industri, sampai pada program keahlian yang terdapat di SMK harus relevan dengan kondisi lingkungan dan tuntutan dunia industri. Persoalan terkait mutu sekolah tidak lepas dengan proses pembelajaran yang

didalamnya terdapat kegiatan inti pendidikan. Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yakni guru. Guru mempunyai peran besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005, guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan sumber daya manusia yang mampu mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta proses belajar mengajar yang bermutu dan menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan di sekolah.

Dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu di sekolah selain faktor guru, terdapat faktor lain yakni kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang menentukan fokus dan suasana pendidikan di sekolah. Kepala sekolah dituntut kreatif dalam setiap aktivitas baik sebagai pengelola lembaga maupun pimpinan lembaga yang menyampaikan visi pendidikan ke dalam organisasi. Kepala sekolah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu keberhasilan pendidikan di sekolah adalah sekolah yang memiliki pemimpin yang berhasil (*effective leaders*).

Hal yang membedakan karakteristik suatu sekolah dengan sekolah lainnya adalah kepemimpinan kepala sekolahnya. Kepala sekolah harus mampu melihat kelebihan maupun kelemahan yang ada di dalam dirinya, serta dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan bawahannya dengan baik. Kepemimpinan yang dinamis dan efektif akan membuat organisasi lebih hidup dan berkualitas. Namun masih banyak dijumpai kepemimpinan kepala

sekolah yang kaku sehingga sulit untuk mempengaruhi, menggerakkan bahkan mengarahkan sumber daya sekolah (guru, siswa, masyarakat) sehingga visi dan program kerja sekolah tidak tersampaikan dengan baik yang *outputnya* akan berpengaruh terhadap mutu sekolah.

Mutu sekolah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan sekolah. Nyatanya tidak dipungkiri masih terdapat sekolah yang terperangkap pada persoalan kuantitas bukan kualitas pendidikan. Disinilah kepemimpinan kepala sekolah ditunjukkan dan dibutuhkan guna mendukung ketercapaian kualitas sekolah dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sekolah.

Dalam UU. No. 20 Tahun 2003 di jelaskan bahwa “pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”, artinya perlu ada sistem dalam pengelolaan sekolah yang mendorong agar siswa lebih siap bekerja dan diminati dunia kerja. Namun kenyataannya pada saat lulus sulit diterima kerja karena rendahnya permintaan tenaga kerja industri terhadap lulusan SMK. Oleh karenanya pola pembelajaran di SMK mengadopsi pembelajaran berbasis industri karena dengan ini siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang nyata dalam suasana industri/ dunia kerja sesungguhnya.

Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan, angka partisipasi industri terhadap proses pendidikan masih terbilang rendah dan belum berkembang. Hal ini terlihat partisipasi industri hanya terbatas kerja sama pada praktik kerja industri (prakerin) dan rekrutmen calon tenaga kerja saja, belum ke aspek yang lain. Selain itu kerja sama seperti peminjaman sarana prasarana praktik (*resource sharing*), pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, mendatangkan

guru tamu, dsb, hanya beberapa sekolah yang melakukannya. Padahal, dengan adanya kerja sama akan turut membantu sekolah dalam meningkatkan mutunya. Hal tersebut terjadi dikarenakan sekolah masih ada yang belum bisa memenuhi syarat untuk melakukan kerja sama seperti pendanaan dan tempat.

Partisipasi industri yang dibangun antara SMK dengan industri diterjemahkan dalam bentuk *MoU* yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dengan masing-masing dengan mitra industrinya. Pihak sekolah harus bersikap bahwasanya sekolah lebih berkepentingan terhadap adanya kerjasama. Sekolah perlu bersikap proaktif untuk menggandeng industri dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Kerjasama yang ditawarkan sekolah dapat membantu industri memperoleh tenaga kerja berkualitas serta mendorong perkembangan industrinya. Pengembangan jejaring kerjasama yang dijalin antara sekolah kejuruan dan dunia industri sangat memungkinkan sekolah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi siswa mendapat pembekalan keterampilan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah sekolah dan industri sudah bermitra maka selanjutnya diharapkan terjadi keselerasan antara SMK dan dunia industri terkait kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang sesuai dan siap untuk bekerja.

Permasalahan yang terdapat di sekolah, khususnya di sekolah kejuruan perlu dipandang sebagai hasil pengamatan yang berimplikasi pada pengembangan strategi mutu pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu sekolah kejuruan (SMK). Persepsi industri terhadap kualitas atau mutu SMK saat ini masih belum memuaskan. Kompetensi yang dimiliki para lulusan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan antara lain oleh perkembangan kurikulum dan ketersediaan fasilitas kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi di industri.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Ori Eyal dalam (Arifin. Z, 2017: 3) “pendidikan kejuruan hendaklah mampu mengembangkan jejaring kerjasama dalam memajukan organisasi dan mencapai tujuan pendidikan”. Oleh karenanya dalam meningkatkan mutu khususnya di SMK tidak terlepas dari dukungan internal dan eksternal seperti dunia industri. Oleh karenanya dukungan dan kerjasama yang dibangun dengan industri merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mengembangkan sekolah serta mengakomodasi kebutuhan pasar terkait dengan tenaga kerja yang kompeten.

Permasalahan dalam konteks mutu sekolah terkait dengan banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya : kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, sumber daya manusia (TU dan staf sekolah), kebijakan pemerintah; biaya dan fasilitas belajar (sarana dan prasarana) serta partisipasi industri. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukmadinata (2006 :7) yang menyatakan bahwa:

Sistem pendidikan yang bermutu hendaklah membutuhkan dukungan dari manajemen, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu dan profesional. Hal tersebut didukung pula dengan sarana dan prasarana pendidikan, media, serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun jumlahnya, dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang kondusif.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mutu sekolah merupakan aspek penting dalam keberhasilan atau indikator maju tidaknya suatu sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menggerakkan seluruh *stakeholders* yang ada. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah perlu adanya partisipasi dari masyarakat salah satunya partisipasi industri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan lebih lanjut mengenai pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi industri terhadap mutu di SMK Negeri di Kota Serang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia di Indonesia dinilai belum memadai dan jauh dari hal yang diinginkan guna mencapai tujuan dalam pendidikan, guru menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Terjadi *miss match* antara yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja yang berdampak pada kompetensi lulusan sekolah yang rendah sehingga keterserapan lulusan belum optimal berakibat terjadi banyaknya pengangguran.
3. Kepemimpinan kepala sekolah yang kaku sehingga tidak dapat menerjemahkan visi dan program kerjanya dengan baik kepada guru, siswa, masyarakat.
4. Masih terdapat sekolah yang lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas pendidikan.
5. Sulitnya bagi calon tenaga kerja lulusan SMK untuk diterima kerja karena rendahnya permintaan kerja dari industri untuk lulusan SMK.
6. Partisipasi industri yang terbilang masih rendah dan belum berkembang.
7. Persepsi industri terhadap SMK akan kualitas dan relevansi saat ini masih belum memuaskan.

8. Perkembangan kurikulum dan pemenuhan fasilitas belajar kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada di industri sehingga berdampak pada kompetensi lulusan rendah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, dan dengan mempertimbangkan banyaknya variabel bebas yang mempengaruhi variabel independen, maka penelitian ini dibatasi pada dua variabel bebas yang berpengaruh langsung terhadap mutu sekolah, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi industri. Keterbatasan pertanyaan penelitian di dorong oleh keterbatasan sumber daya (seperti waktu dan biaya), sehingga ruang lingkup penelitian ini terbatas pada guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Serang.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap mutu SMK?
2. Apakah partisipasi industri berpengaruh langsung terhadap mutu SMK?
3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap partisipasi industri?

### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu SMK.
2. Mengetahui pengaruh partisipasi industri terhadap mutu SMK.

3. Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap partisipasi industri.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan kajian konseptual dan praktis yaitu sebagai berikut.

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

- a. Dapat memberikan kontribusi yang efektif untuk kepentingan akademis bidang pendidikan dalam teori, metode, dan pengalaman terutama manajemen pendidikan sekolah
- b. Dapat dijadikan suatu pola dan strategi dalam meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi industri terhadap mutu SMK Negeri di Kota Serang.
- c. Dapat dijadikan sebagai alternatif model inovasi dalam pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi industri terhadap mutu SMK Negeri di kota Serang.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti atau pihak lain yang berkepentingan. Signifikansi penelitian ini dapat mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pengelola pendidikan dalam upaya memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi industri terhadap mutu SMK Negeri di kota Serang.

- b. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi dunia industri sebagai mitra sekolah, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan secara kontekstual dan konseptual operasional dalam merumuskan konsep dan program pengembangan dan peningkatan mutu SMK.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, penempatan, supervisi serta evaluasi kepemimpinan kepala sekolah dan partisipasi industri terhadap mutu SMK negeri di Kota Serang sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

#### ***G. State of The Art***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis membawa implikasi terhadap orientasi perkembangan pendidikan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pembaharuan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan pembeda dari berbagai penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Agustinus Sumaryono (2018), “Pengaruh Kepemimpinan Autentik Kepala Sekolah, Work Engagement, Dan Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan SMA Katolik di Bali”. Penelitian ini hanya membahas mengenai tentang kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi mutu sekolah, tetapi belum membahas partisipasi masyarakat khususnya industri dalam mempengaruhi mutu sekolah.
2. Penelitian Rochana (2014), “Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru, Fasilitas Belajar, Dan Partisipasi Dunia Industri Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Jawa Barat”. Responden dalam penelitian ini melibatkan 480 orang yang tersebar dari 30 SMK di

provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menjadi rujukan utama oleh peneliti dalam penelitian dengan menggunakan guru sebagai responden.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Bintoro Johan, Slamet PH, Widodo dalam jurnal taman vokasi Vol.7, Issue (2) 2019 (pp. 216-224) dengan judul *“Evaluation Of Education Implementation Of Link And Match Systems Of The Industrial And Vocational School In Yogyakarta Province.* Penelitian ini mengungkapkan partisipasi industri mempengaruhi mutu sekolah. Hal ini dibuktikan strategi pembelajaran TVET yang diterapkan sehingga berdampak terhadap kesiapan siswa dalam memenuhi kebutuhan industri. Alhasil secara tidak langsung berdampak terhadap mutu sekolah. Pembaruan yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan sampel populasi kepada guru SMK Negeri di kota Serang dan menambah variabel kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini.

